



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran berkenaan.
8. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;
9. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh

- penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
 15. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
 16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
 17. Surat Permintaan Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM
 18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala.
 19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 20. Bupati adalah Bupati Donggala.
 21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan, Pengalokasian Alokasi Dana Desa
- b. tata cara Penyaluran Alokasi Dana Desa
- c. pembinaan, Pengawasan dan Penundaan Penyaluran; dan
- d. pelaporan.

BAB II

PENETAPAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD kepada Pemerintah Desa ditetapkan sebesar Rp 65.339.138.600 (enam puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 158 (seratus lima puluh delapan) Pemerintah Desa se-Kabupaten Donggala dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan Belanja Operasional Desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Pertimbangan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis, angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung dengan bobot :
 - a. 90% (sembilan puluh persen) untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa, untuk luas wilayah desa, untuk angka kemiskinan desa dan untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (4) Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dihitung dengan cara :
 - a. Total Pagu ADD x (90% dengan mempertimbangkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa / 158 desa); dan
 - b. Total Pagu ADD 10% dihitung dengan cara:
$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten donggala.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten donggala.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten donggala.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten donggala.

- (5) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, merupakan besaran nilai ADD setiap Desa.
- (6) Data jumlah penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (7) Data Indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bersumber dari Kementerian Keuangan.

Pasal 4

Hasil Perhitungan dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam Dokumen APBDesa.
- (2) ADD oleh Pemerintah Desa dapat digunakan setelah ditetapkan didalam Dokumen APB Desa.
- (3) Dokumen APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ADD

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat pada bulan Januari dan Paling lambat minggu ketiga bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh perseratus)
 - b. tahap II paling cepat pada bulan Maret dan Paling lambat minggu Keempat bulan Agustus sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa;

- b. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 - c. surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 - d. rekomendasi dari Camat dengan melampirkan hasil verifikasi dan evaluasi ;
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PPKD dan TPK;
 - f. foto kondisi 0% (nol persen) lokasi pembangunan;
 - g. DPA dan DPAL jika ada SILPA dan RAK Desa;
 - h. foto copy Print Out buku rekening pemerintah desa;
 - i. foto copy NPWP Pemerintah Desa;
 - j. surat Pernyataan Tanggung Jawab/Pakta integritas bermaterai;
 - k. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;
 - l. Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa tahun sebelumnya setelah diverifikasi oleh Camat.
 - m. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - n. berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahun sebelumnya dari pelaksana kegiatan ke kepala desa yang diketahui oleh camat;dan
 - o. Ekspor data Siskeudes.
- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I kepada Bupati setelah dievaluasi oleh Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Laporan pertanggung jawaban tahun sebelumnya;
 - b. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
 - c. rekomendasi dari Camat dengan melampirkan hasil verifikasi dan evaluasi ;
 - d. DPPA dan Rencana Anggaran Kas Perubahan jika ada perubahan;
 - e. laporan realisasi penggunaan dana Tahap I minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - f. dokumentasi kondisi Tahap I (0% s.d 100%);
 - g. foto kondisi 0% (nol perseratus) lokasi pembangunan dan/atau pembangunan lanjutan;
 - h. berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahap I yang telah selesai dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
 - i. buku pembantu pajak;
 - j. bukti setoran pajak tahap I.

- (5) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan ADD tahap I kepada Bupati setelah dievaluasi oleh Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Peraturan Desa tentang APBDDesa-P jika ada perubahan;
 - b. surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
 - c. rekomendasi dari Camat dengan melampirkan hasil verifikasi dan evaluasi;
 - d. dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas Perubahan jika ada perubahan;
 - e. laporan realisasi penggunaan dana Tahap II minimal 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - f. dokumentasi kondisi Tahap II 0% s.d 100% (nol perseratus s.d seratus perseratus);
 - g. foto kondisi 0% (nol perseratus) lokasi pembangunan dan/atau pembangunan lanjutan;
 - h. berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahap I dan tahap II yang telah selesai dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat; dan
 - i. bukti setoran pajak tahap II.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengelolaan Desa yang dilaksanakan melalui rekening Kas Desa.
- (2) Pengelolaan Keuangan desa yang sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengajuan SPP yang diajukan Kaur dan Kasi Pelaksanaan kegiatan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap sebagai arsip desa dan 1 (satu) rangkap dibawa serta pada saat melakukan pencairan di Bank
- (4) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Pengajuan dan pembayaran SPP untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang-jasa diterima.
- (6) Pengajuan SPP wajib menyatakan Laporan perkembangan Pelaksana kegiatan dan anggaran.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran APBDesa untuk proses pencairan ke 158 (seratus lima puluh delapan) Desa dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Keuangan Daerah dengan menerbitkan SP2D yang disalurkan atas nama Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ke rekening Desa masing-masing.
- (2) Penyaluran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima surat permohonan pencairan ADD dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Surat permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau dapat didelegasikan setelah adanya surat kuasa dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Surat permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah menerima rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan atau dapat didelegasikan setelah adanya surat kuasa dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan

BAB IV

Pembinaan, Pengawasan dan Penundaan Penyaluran ADD

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa ADD di RKD, dan/atau
- b. penggunaan ADD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditemukan sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai ADD di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADD yang diterima Desa pada Tahun Anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah.

Bagian Kedua

Penundaan Penyaluran

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan/atau pasal 6 ayat (4) dan/atau pasal 6 ayat (5);
 - b. terdapat Sisa dana dalam Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus);dan

- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah atas hasil pemeriksaan ADD.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADD tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.
 - (5) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat lagi disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana di RKUD.
 - (6) Sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat kembali disalurkan pada tahun berikutnya dengan memperhatikan asas keadilan, kemanusiaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan Realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan paling lambat tanggal 7 bulan Februari Tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan Realisasi penggunaan ADD sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat Tanggal 7 bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD.
- (6) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada Camat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2022 NOMOR 752

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



AMIR, SH

Nip. 19790609 200502 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Desa	ADD Penghasilan tetap	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)	
I	KECAMATAN RIO PAKAVA																	
1	Pantolobete	372,184,967	844	0.0031	0.03%	349	1.01%	0.40%	10.86	0.26%	0.05%	47.38	0.73%	0.22%	0.70%	46,036,697	418,222,000	
2	Bonemarawa	372,184,967	1955	0.0071	0.07%	238	0.69%	0.27%	16.37	0.39%	0.08%	41.55	0.64%	0.19%	0.62%	40,239,458	412,424,000	
3	Tinauka	372,184,967	1514	0.0055	0.05%	93	0.27%	0.11%	75.94	1.80%	0.36%	43.40	0.67%	0.20%	0.72%	47,254,818	419,440,000	
4	Lalundu	372,184,967	2358	0.0086	0.09%	127	0.37%	0.15%	24.02	0.57%	0.11%	33.86	0.52%	0.16%	0.50%	32,856,090	405,041,000	
5	Towiora	372,184,967	2005	0.0073	0.07%	192	0.55%	0.22%	84.49	2.00%	0.40%	29.00	0.45%	0.13%	0.83%	54,170,635	426,356,000	
6	Minti Makmur	372,184,967	3052	0.0111	0.11%	71	0.20%	0.08%	19.42	0.46%	0.09%	28.25	0.44%	0.13%	0.42%	27,157,023	399,342,000	
7	Polanto Jaya	372,184,967	2966	0.0108	0.11%	53	0.15%	0.06%	12.33	0.29%	0.06%	33.45	0.52%	0.16%	0.38%	24,974,360	397,159,000	
8	Polando Jaya	372,184,967	947	0.0034	0.03%	41	0.12%	0.05%	18.55	0.44%	0.09%	47.26	0.73%	0.22%	0.39%	25,392,165	397,577,000	
9	Rio Mukti	372,184,967	1704	0.0062	0.06%	8	0.02%	0.01%	9.32	0.22%	0.04%	41.01	0.63%	0.19%	0.31%	19,948,929	392,134,000	
10	Panca Mukti	372,184,967	891	0.0032	0.03%	21	0.06%	0.02%	10.38	0.25%	0.05%	48.11	0.74%	0.22%	0.33%	21,481,558	393,667,000	
11	Ngovi	372,184,967	1259	0.0046	0.05%	482	1.39%	0.56%	71.50	1.69%	0.34%	48.95	0.76%	0.23%	1.17%	76,298,106	448,483,000	
12	Bukit Indah	372,184,967	803	0.0029	0.03%	9	0.03%	0.01%	66.97	1.59%	0.32%	36.15	0.56%	0.17%	0.52%	34,261,860	406,447,000	
13	Mbulawa	372,184,967	672	0.0024	0.02%	180	0.52%	0.21%	49.67	1.18%	0.24%	52.45	0.81%	0.24%	0.71%	46,434,317	418,619,000	
14	Pakava	372,184,967	1193	0.0043	0.04%	913	2.63%	1.05%	68.29	1.62%	0.32%	44.62	0.69%	0.21%	1.63%	106,343,744	478,526,600	
II	KECAMATAN DAMPELAS																-	
15	Kambayang	372,184,967	1020	0.0037	0.04%	150	0.43%	0.17%	49.46	1.17%	0.23%	32.49	0.50%	0.15%	0.60%	38,882,477	411,067,000	
16	Talaga	372,184,967	2851	0.0103	0.10%	279	0.81%	0.32%	88.17	2.09%	0.42%	36.16	0.56%	0.17%	1.01%	66,042,388	438,227,000	
17	Sabang	372,184,967	1666	0.0060	0.06%	102	0.29%	0.12%	84.82	2.01%	0.40%	33.82	0.52%	0.16%	0.74%	48,140,346	420,325,000	
18	Sioyong	372,184,967	3763	0.0136	0.14%	506	1.46%	0.58%	46.94	1.11%	0.22%	37.61	0.58%	0.17%	1.12%	73,003,987	445,189,000	
19	Pani'I	372,184,967	2138	0.0078	0.08%	249	0.72%	0.29%	84.58	2.00%	0.40%	39.16	0.61%	0.18%	0.95%	61,890,087	434,075,000	
20	Ponggerang	372,184,967	2524	0.0092	0.09%	228	0.66%	0.26%	64.91	1.54%	0.31%	35.98	0.56%	0.17%	0.83%	54,170,549	426,356,000	
21	Rerang	372,184,967	3181	0.0115	0.12%	338	0.98%	0.39%	132.69	3.14%	0.63%	33.41	0.52%	0.15%	1.29%	84,223,374	456,408,000	
22	Budi Mukti	372,184,967	2063	0.0075	0.07%	22	0.06%	0.03%	12.95	0.31%	0.06%	30.29	0.47%	0.14%	0.30%	19,731,032	391,916,000	
23	Lembah Mukti	372,184,967	2373	0.0086	0.09%	83	0.24%	0.10%	14.43	0.34%	0.07%	35.52	0.55%	0.16%	0.41%	27,109,074	399,294,000	
24	Malonas	372,184,967	3179	0.0115	0.12%	287	0.83%	0.33%	96.22	2.28%	0.46%	29.65	0.46%	0.14%	1.04%	67,944,203	440,129,000	
25	Parisan Agung	372,184,967	1619	0.0059	0.06%	125	0.36%	0.14%	42.66	1.01%	0.20%	38.58	0.60%	0.18%	0.58%	38,154,346	410,339,000	
26	Karya Mukti	372,184,967	4041	0.0147	0.15%	101	0.29%	0.12%	13.13	0.31%	0.06%	34.25	0.53%	0.16%	0.48%	31,630,604	403,816,000	
27	Long	372,184,967	901	0.0033	0.03%	156	0.45%	0.18%	27.73	0.66%	0.13%	47.54	0.73%	0.22%	0.56%	36,884,313	409,069,000	
III	KECAMATAN BANAWA																-	
28	Loli Oge	372,184,967	1966	0.0071	0.07%	112	0.32%	0.13%	10.54	0.25%	0.05%	51.27	0.79%	0.24%	0.49%	31,899,139	404,084,000	
29	Loli Tasiburi	372,184,967	2144	0.0078	0.08%	123	0.35%	0.14%	10.85	0.26%	0.05%	30.97	0.48%	0.14%	0.41%	27,096,070	399,281,000	
30	Loli Pesua	372,184,967	1699	0.0062	0.06%	151	0.44%	0.17%	9.10	0.22%	0.04%	39.31	0.61%	0.18%	0.46%	30,137,344	402,322,000	
31	Loli Dondo	372,184,967	1496	0.0054	0.05%	68	0.20%	0.08%	13.72	0.33%	0.07%	30.06	0.46%	0.14%	0.34%	22,027,198	394,212,000	
32	Loli Saluran	372,184,967	1213	0.0044	0.04%	7	0.02%	0.01%	9.26	0.22%	0.04%	43.75	0.68%	0.20%	0.30%	19,523,881	391,709,000	
IV	KECAMATAN LABUAN																-	
33	Labuan	372,184,967	2814	0.0102	0.10%	125	0.36%	0.14%	6.18	0.15%	0.03%	29.27	0.45%	0.14%	0.41%	26,874,689	399,060,000	
34	Labuan Salumbone	372,184,967	1958	0.0071	0.07%	190	0.55%	0.22%	2.58	0.06%	0.01%	35.59	0.55%	0.17%	0.47%	30,549,240	402,734,000	
35	Labuan Panimba	372,184,967	2797	0.0101	0.10%	227	0.66%	0.26%	12.36	0.29%	0.06%	28.68	0.44%	0.13%	0.56%	36,263,983	408,449,000	
36	Labuan Lelea	372,184,967	2548	0.0092	0.09%	101	0.29%	0.12%	8.98	0.21%	0.04%	32.90	0.51%	0.15%	0.40%	26,403,822	398,589,000	
37	Labuan Kungguma	372,184,967	1366	0.0050	0.05%	91	0.26%	0.11%	27.97	0.66%	0.13%	26.77	0.41%	0.12%	0.41%	26,866,804	399,052,000	
38	Labuan Toposo	372,184,967	2845	0.0103	0.10%	550	1.59%	0.63%	62.44	1.48%	0.30%	38.50	0.60%	0.18%	1.21%	79,214,846	451,400,000	
39	Labuan Lumbubaka	372,184,967	582	0.0021	0.02%	42	0.12%	0.05%	9.47	0.22%	0.04%	47.48	0.73%	0.22%	0.33%	21,860,358	394,045,000	

[illegible]

95	Salungkaenu	372,184,967	905	0.0033	0.03%	333	0.96%	0.38%	52.86	1.25%	0.25%	47.54	0.73%	0.22%	0.89%	58,023,815	430,209,000
96	Lumbumamara	372,184,967	1555	0.0056	0.06%	349	1.01%	0.40%	41.11	0.97%	0.19%	47.50	0.73%	0.22%	0.87%	57,122,297	429,307,000
97	Tolongano	372,184,967	1541	0.0056	0.06%	316	0.91%	0.36%	16.52	0.39%	0.08%	43.36	0.67%	0.20%	0.70%	45,734,659	417,920,000
98	Tosale	372,184,967	2154	0.0078	0.08%	579	1.67%	0.67%	12.88	0.31%	0.06%	40.51	0.63%	0.19%	1.00%	65,030,649	437,216,000
99	Lumbu Tarombo	372,184,967	1389	0.0050	0.05%	127	0.37%	0.15%	6.59	0.16%	0.03%	46.49	0.72%	0.22%	0.44%	28,995,510	401,180,000
100	Lumbulama	372,184,967	928	0.0034	0.03%	379	1.09%	0.44%	19.78	0.47%	0.09%	70.40	1.09%	0.33%	0.89%	58,234,626	430,420,000
101	Ongulara	372,184,967	649	0.0024	0.02%	358	1.03%	0.41%	23.49	0.56%	0.11%	60.95	0.94%	0.28%	0.83%	54,275,264	426,460,000
102	Malino	372,184,967	883	0.0032	0.03%	342	0.99%	0.39%	39.03	0.92%	0.18%	64.64	1.00%	0.30%	0.91%	59,547,181	431,732,000
103	Lembasada	372,184,967	1283	0.0047	0.05%	133	0.38%	0.15%	9.65	0.23%	0.05%	31.64	0.49%	0.15%	0.39%	25,641,851	397,827,000
104	Sarombaya	372,184,967	750	0.0027	0.03%	194	0.56%	0.22%	14.37	0.34%	0.07%	46.11	0.71%	0.21%	0.53%	34,826,640	407,012,000
105	Salusumpu	372,184,967	805	0.0029	0.03%	102	0.29%	0.12%	21.49	0.51%	0.10%	32.21	0.50%	0.15%	0.40%	26,008,658	398,194,000
106	Tanampulu	372,184,967	701	0.0025	0.03%	70	0.20%	0.08%	3.22	0.08%	0.02%	41.38	0.64%	0.19%	0.31%	20,474,072	392,659,000
X KECAMATAN TANANTOVEA																	
107	Wani Satu	372,184,967	2641	0.0096	0.10%	54	0.16%	0.06%	6.65	0.16%	0.03%	23.41	0.36%	0.11%	0.30%	19,480,619	391,666,000
108	Wani Dua	372,184,967	2911	0.0106	0.11%	33	0.10%	0.04%	9.82	0.23%	0.05%	21.25	0.33%	0.10%	0.29%	18,862,103	391,047,000
109	Nupa Bomba	372,184,967	3133	0.0114	0.11%	128	0.37%	0.15%	11.28	0.27%	0.05%	33.22	0.51%	0.15%	0.47%	30,631,481	402,816,000
110	Wombo	372,184,967	1273	0.0046	0.05%	77	0.22%	0.09%	42.81	1.01%	0.20%	26.98	0.42%	0.13%	0.46%	30,248,092	402,433,000
111	Guntarano	372,184,967	1789	0.0065	0.06%	42	0.12%	0.05%	41.88	0.99%	0.20%	35.77	0.55%	0.17%	0.48%	31,206,887	403,392,000
112	Bale	372,184,967	1456	0.0053	0.05%	72	0.21%	0.08%	57.37	1.36%	0.27%	41.28	0.64%	0.19%	0.60%	39,143,958	411,329,000
113	Wombo Mpanau	372,184,967	1204	0.0044	0.04%	27	0.08%	0.03%	6.04	0.14%	0.03%	39.93	0.62%	0.19%	0.29%	18,855,519	391,040,000
114	Wombo Kalonggo	372,184,967	924	0.0034	0.03%	43	0.12%	0.05%	18.35	0.43%	0.09%	36.94	0.57%	0.17%	0.34%	22,304,245	394,489,000
115	Wani Tiga	372,184,967	350	0.0013	0.01%	69	0.20%	0.08%	1.63	0.04%	0.01%	35.94	0.56%	0.17%	0.27%	17,426,115	389,611,000
116	Wani Lumbumpetigo	372,184,967	865	0.0031	0.03%	131	0.38%	0.15%	0.74	0.02%	0.01%	36.42	0.56%	0.17%	0.35%	23,189,612	395,375,000
XI KECAMATAN PINEMBANI																	
117	Palintuma	372,184,967	1638	0.0059	0.06%	862	2.49%	1.00%	16.49	0.39%	0.08%	69.33	1.07%	0.32%	1.45%	95,000,248	467,185,000
118	Gimpubia	372,184,967	764	0.0028	0.03%	269	0.78%	0.31%	6.10	0.14%	0.03%	50.36	0.78%	0.23%	0.60%	39,241,697	411,427,000
119	Dangara'A	372,184,967	288	0.0010	0.01%	82	0.24%	0.09%	7.46	0.18%	0.04%	78.14	1.21%	0.36%	0.50%	32,847,834	405,033,000
120	Bambakanini	372,184,967	553	0.0020	0.02%	465	1.34%	0.54%	22.93	0.54%	0.11%	73.79	1.14%	0.34%	1.01%	65,832,740	438,018,000
121	Bambakaenu	372,184,967	578	0.0021	0.02%	277	0.80%	0.32%	13.26	0.31%	0.06%	70.62	1.09%	0.33%	0.73%	47,759,276	419,944,000
122	Tomodo	372,184,967	910	0.0033	0.03%	470	1.36%	0.54%	11.61	0.28%	0.06%	47.66	0.74%	0.22%	0.85%	55,636,474	427,821,000
123	Kanagalongga	372,184,967	498	0.0018	0.02%	279	0.81%	0.32%	7.69	0.18%	0.04%	73.54	1.14%	0.34%	0.72%	46,880,601	419,066,000
124	Karavia	372,184,967	507	0.0018	0.02%	496	1.43%	0.57%	16.49	0.39%	0.08%	76.78	1.19%	0.36%	1.02%	66,972,435	439,157,000
125	Tavanggeli	372,184,967	181	0.0007	0.01%	179	0.52%	0.21%	4.40	0.10%	0.02%	48.20	0.74%	0.22%	0.46%	29,891,779	402,077,000
XII KECAMATAN SINDUE TOMBUSABORA																	
126	Tibo	372,184,967	3457	0.0125	0.13%	415	1.20%	0.48%	27.43	0.65%	0.13%	29.15	0.45%	0.14%	0.87%	56,811,732	428,997,000
127	Kaliburu	372,184,967	1845	0.0067	0.07%	182	0.53%	0.21%	30.95	0.73%	0.15%	51.92	0.80%	0.24%	0.66%	43,407,481	415,592,000
128	Batusuya	372,184,967	2719	0.0099	0.10%	544	1.57%	0.63%	18.55	0.44%	0.09%	34.31	0.53%	0.16%	0.97%	63,606,190	435,791,000
129	Saloya	372,184,967	2223	0.0081	0.08%	571	1.65%	0.66%	56.63	1.34%	0.27%	44.68	0.69%	0.21%	1.22%	79,398,244	451,583,000
130	Batusuya Go'O	372,184,967	1653	0.0060	0.06%	357	1.03%	0.41%	9.85	0.23%	0.05%	50.44	0.78%	0.23%	0.75%	49,171,833	421,357,000
131	Kaliburu Kata	372,184,967	731	0.0027	0.03%	276	0.80%	0.32%	20.75	0.49%	0.10%	48.42	0.75%	0.22%	0.67%	43,640,043	415,825,000
XIII KECAMATAN SINDUE TOBATA																	
132	Sikara Tobata	372,184,967	1774	0.0064	0.06%	519	1.50%	0.60%	35.81	0.85%	0.17%	45.38	0.70%	0.21%	1.04%	68,179,449	440,364,000
133	Alindau	372,184,967	2819	0.0102	0.10%	506	1.46%	0.58%	66.74	1.58%	0.32%	28.90	0.45%	0.13%	1.14%	74,256,452	446,441,000
134	Oti	372,184,967	2724	0.0099	0.10%	404	1.17%	0.47%	48.01	1.14%	0.23%	27.42	0.42%	0.13%	0.92%	60,091,520	432,276,000
135	Tamarenja	372,184,967	1612	0.0058	0.06%	139	0.40%	0.16%	23.56	0.56%	0.11%	28.13	0.43%	0.13%	0.46%	30,116,207	402,301,000
136	Sipeso	372,184,967	678	0.0025	0.02%	154	0.44%	0.18%	20.58	0.49%	0.10%	51.11	0.79%	0.24%	0.54%	35,074,463	407,259,000
137	Sindosa	372,184,967	447	0.0016	0.02%	59	0.17%	0.07%	19.28	0.46%	0.09%	48.70	0.75%	0.23%	0.40%	26,227,551	398,413,000

XIV	KECAMATAN BANAWA TENGAH																	-
138	Powelua	372,184,967	1637	0.0059	0.06%	699	2.02%	0.81%	38.51	0.91%	0.18%	39.41	0.61%	0.18%	1.23%	80,457,006	452,642,000	
139	Lumbudolo	372,184,967	994	0.0036	0.04%	18	0.05%	0.02%	1.05	0.02%	0.00%	28.61	0.44%	0.13%	0.19%	12,707,089	384,892,000	
140	Kola-Kola	372,184,967	1382	0.0050	0.05%	75	0.22%	0.09%	7.85	0.19%	0.04%	27.18	0.42%	0.13%	0.30%	19,594,812	391,780,000	
141	Limboro	372,184,967	2028	0.0074	0.07%	194	0.56%	0.22%	10.93	0.26%	0.05%	23.46	0.36%	0.11%	0.46%	29,926,796	402,112,000	
142	Towale	372,184,967	2124	0.0077	0.08%	163	0.47%	0.19%	5.49	0.13%	0.03%	39.14	0.60%	0.18%	0.47%	30,883,319	403,068,000	
143	Salubomba	372,184,967	1583	0.0057	0.06%	147	0.42%	0.17%	3.49	0.08%	0.02%	40.66	0.63%	0.19%	0.43%	28,234,864	400,420,000	
144	Mekar Baru	372,184,967	951	0.0034	0.03%	58	0.17%	0.07%	1.37	0.03%	0.01%	39.75	0.61%	0.18%	0.29%	19,094,158	391,279,000	
145	Lampo	372,184,967	820	0.0030	0.03%	167	0.48%	0.19%	1.62	0.04%	0.01%	44.14	0.68%	0.20%	0.43%	28,410,640	400,596,000	
XV	KECAMATAN SOJOL UTARA																-	
146	Ogoamas I	372,184,967	4126	0.0150	0.15%	121	0.35%	0.14%	46.24	1.10%	0.22%	26.45	0.41%	0.12%	0.63%	41,229,096	413,414,000	
147	Ogoamas li	372,184,967	2864	0.0104	0.10%	235	0.68%	0.27%	44.14	1.05%	0.21%	28.83	0.45%	0.13%	0.72%	46,908,230	419,093,000	
148	Lenju	372,184,967	1207	0.0044	0.04%	223	0.64%	0.26%	19.10	0.45%	0.09%	56.49	0.87%	0.26%	0.65%	42,705,638	414,891,000	
149	Pesik	372,184,967	757	0.0027	0.03%	192	0.55%	0.22%	26.16	0.62%	0.12%	57.08	0.88%	0.26%	0.64%	41,664,093	413,849,000	
150	Bengkoli	372,184,967	494	0.0018	0.02%	79	0.23%	0.09%	26.60	0.63%	0.13%	60.27	0.93%	0.28%	0.51%	33,620,364	405,805,000	
XVI	KECAMATAN BALAESANG TANJUNG																-	
151	Walandano	372,184,967	1281	0.0046	0.05%	188	0.54%	0.22%	32.22	0.76%	0.15%	55.11	0.85%	0.26%	0.67%	43,882,931	416,068,000	
152	Malei	372,184,967	2106	0.0076	0.08%	182	0.53%	0.21%	24.68	0.58%	0.12%	33.72	0.52%	0.16%	0.56%	36,570,023	408,755,000	
153	Kamonji	372,184,967	1178	0.0043	0.04%	67	0.19%	0.08%	19.94	0.47%	0.09%	58.73	0.91%	0.27%	0.49%	31,808,020	403,993,000	
154	Ketong	372,184,967	2092	0.0076	0.08%	190	0.55%	0.22%	33.59	0.80%	0.16%	58.91	0.91%	0.27%	0.73%	47,530,600	419,716,000	
155	Rano	372,184,967	1521	0.0055	0.06%	331	0.96%	0.38%	55.91	1.32%	0.26%	60.83	0.94%	0.28%	0.98%	64,300,241	436,485,000	
156	Pomolulu	372,184,967	1747	0.0063	0.06%	465	1.34%	0.54%	14.53	0.34%	0.07%	48.85	0.75%	0.23%	0.90%	58,505,871	430,691,000	
157	Palau	372,184,967	1090	0.0040	0.04%	459	1.32%	0.53%	9.69	0.23%	0.05%	60.83	0.94%	0.28%	0.90%	58,626,241	430,811,000	
158	Manimbaya	372,184,967	1099	0.0040	0.04%	300	0.87%	0.35%	13.29	0.31%	0.06%	68.38	1.06%	0.32%	0.77%	50,060,426	422,245,000	
Total		58,805,224,740	275,772	100%	10%	34,652	100%	40%	4,222	100%	20%	6,471	100%	30%	100%	6,533,913,860	65,339,138,600	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Donggala	65,339,138,600
Pagu Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap (90%)	58,805,224,740
Pagu Bagian Formula (10%)	6,533,913,860
Jumlah Desa	158

Bobot	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Donggala, 2022

Mengetahui,

KEPALA BPKAD
Kab.Donggala

KEPALA DINAS PMD
Kab.Donggala

HATTA MOH TAHIR, S.Pt, M.Si
NIP:19620402 200003 1 003

ABRAHAM, SE
NIP. 19620616 199203 1 006

BUPATI DONGGALA

ttd

KASMAN LASSA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DONGGALA
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	30%	30%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PANTLOBETE	418,222,000	125,466,600	125,466,600	167,288,800
2	BONEMARAWA	412,424,000	123,727,200	123,727,200	164,969,600
3	TINAUKA	419,440,000	125,832,000	125,832,000	167,776,000
4	LALUNDU	405,041,000	121,512,300	121,512,300	162,016,400
5	TOVIOA	426,356,000	127,906,800	127,906,800	170,542,400
6	MINTI MAKMUR	399,342,000	119,802,600	119,802,600	159,736,800
7	POLANTO JAYA	397,159,000	119,147,700	119,147,700	158,863,600
8	POLANDO JAYA	397,577,000	119,273,100	119,273,100	159,030,800
9	RIO MUKTI	392,134,000	117,640,200	117,640,200	156,853,600
10	PANCA MUKTI	393,667,000	118,100,100	118,100,100	157,466,800
11	NGOVI VAKAVA	448,483,000	134,544,900	134,544,900	179,393,200
12	BUKIT INDAH	406,447,000	121,934,100	121,934,100	162,578,800
13	MBULAWA	418,619,000	125,585,700	125,585,700	167,447,600
14	PAKAVA	478,526,600	143,557,980	143,557,980	191,410,640
15	KAMBAYANG	411,067,000	123,320,100	123,320,100	164,426,800
16	TALAGA	438,227,000	131,468,100	131,468,100	175,290,800
17	SABANG	420,325,000	126,097,500	126,097,500	168,130,000
18	SIOYONG	445,189,000	133,556,700	133,556,700	178,075,600
19	PANII	434,075,000	130,222,500	130,222,500	173,630,000
20	PONGGERANG	426,356,000	127,906,800	127,906,800	170,542,400
21	RERANG	456,408,000	136,922,400	136,922,400	182,563,200
22	BUDI MUKTI	391,916,000	117,574,800	117,574,800	156,766,400
23	LEMBAH MUKTI	399,294,000	119,788,200	119,788,200	159,717,600
24	MALONAS	440,129,000	132,038,700	132,038,700	176,051,600
25	PARISAN AGUNG	410,339,000	123,101,700	123,101,700	164,135,600
26	KARYA MUKTI	403,816,000	121,144,800	121,144,800	161,526,400
27	LONG	409,069,000	122,720,700	122,720,700	163,627,600
28	LOLI OGE	404,084,000	121,225,200	121,225,200	161,633,600
29	LOLI TASIBURI	399,281,000	119,784,300	119,784,300	159,712,400
30	LOLI PESUA	402,322,000	120,696,600	120,696,600	160,928,800
31	LOLI DONDO	394,212,000	118,263,600	118,263,600	157,684,800
32	LOLI SALURAN	391,709,000	117,512,700	117,512,700	156,683,600
33	LABUAN	399,060,000	119,718,000	119,718,000	159,624,000
34	LABUAN SALUMBONE	402,734,000	120,820,200	120,820,200	161,093,600
35	LABUAN PANIMBA	408,449,000	122,534,700	122,534,700	163,379,600
36	LABUAN LELEA	398,589,000	119,576,700	119,576,700	159,435,600
37	LABUAN KUNGGUMA	399,052,000	119,715,600	119,715,600	159,620,800
38	LABUAN TOPOSO	451,400,000	135,420,000	135,420,000	180,560,000
39	LABUAN LUMBUBAKA	394,045,000	118,213,500	118,213,500	157,618,000
40	DALAKA	397,049,000	119,114,700	119,114,700	158,819,600
41	LERO	400,055,000	120,016,500	120,016,500	160,022,000
42	TARIPA	400,897,000	120,269,100	120,269,100	160,358,800
43	SUMARI	393,227,000	117,968,100	117,968,100	157,290,800
44	TOAYA	407,914,000	122,374,200	122,374,200	163,165,600
45	MASAINGI	398,249,000	119,474,700	119,474,700	159,299,600
46	MARANA	398,640,000	119,592,000	119,592,000	159,456,000
47	ENU	411,017,000	123,305,100	123,305,100	164,406,800
48	LERO TATARI	396,574,000	118,972,200	118,972,200	158,629,600
49	TOAYA VUNTA	409,733,000	122,919,900	122,919,900	163,893,200
50	GUMBASA	410,227,000	123,068,100	123,068,100	164,090,800
51	APE MALIKO	420,646,000	126,193,800	126,193,800	168,258,400
52	KAVAYA	403,177,000	120,953,100	120,953,100	161,270,800

53	OMBO	393,993,000	118,197,900	118,197,900	157,597,200
54	TONDO	399,408,000	119,822,400	119,822,400	159,763,200
55	JONOOGE	403,491,000	121,047,300	121,047,300	161,396,400
56	DAMPAL	392,096,000	117,628,800	117,628,800	156,838,400
57	SIPi	409,417,000	122,825,100	122,825,100	163,766,800
58	TANJUNG PADANG	395,554,000	118,666,200	118,666,200	158,221,600
59	BALINTUMA	404,973,000	121,491,900	121,491,900	161,989,200
60	SIBADO	428,683,000	128,604,900	128,604,900	171,473,200
61	TOMPE	398,685,000	119,605,500	119,605,500	159,474,000
62	LOMPIO	406,809,000	122,042,700	122,042,700	162,723,600
63	LENDE	411,603,000	123,480,900	123,480,900	164,641,200
64	LENDE TOVEA	419,075,000	125,722,500	125,722,500	167,630,000
65	UJUMBO	399,307,000	119,792,100	119,792,100	159,722,800
66	LABEAN	432,268,000	129,680,400	129,680,400	172,907,200
67	LOMBONGA	417,813,000	125,343,900	125,343,900	167,125,200
68	MELI	413,621,000	124,086,300	124,086,300	165,448,400
69	TAMBU	410,726,000	123,217,800	123,217,800	164,290,400
70	SIWELI	450,369,000	135,110,700	135,110,700	180,147,600
71	SIBUALONG	412,571,000	123,771,300	123,771,300	165,028,400
72	SIBAYU	409,732,000	122,919,600	122,919,600	163,892,800
73	MALINO	415,941,000	124,782,300	124,782,300	166,376,400
74	MAPANE TAMBU	401,618,000	120,485,400	120,485,400	160,647,200
75	TOVIA TAMBU	421,085,000	126,325,500	126,325,500	168,434,000
76	SIPURE	395,840,000	118,752,000	118,752,000	158,336,000
77	KAMPUNG BARU SIBAYU	401,548,000	120,464,400	120,464,400	160,619,200
78	SIMAGAYA	414,374,000	124,312,200	124,312,200	165,749,600
79	BALUKANG	425,471,000	127,641,300	127,641,300	170,188,400
80	SIWALEMPU	457,352,000	137,205,600	137,205,600	182,940,800
81	SIBOANG	434,489,000	130,346,700	130,346,700	173,795,600
82	TONGGOLOBIBI	436,332,000	130,899,600	130,899,600	174,532,800
83	BOU	418,943,000	125,682,900	125,682,900	167,577,200
84	SAMALILI	407,685,000	122,305,500	122,305,500	163,074,000
85	BUKIT HARAPAN	401,035,000	120,310,500	120,310,500	160,414,000
86	PANGALASIANG	443,310,000	132,993,000	132,993,000	177,324,000
87	BALUKANG II	431,122,000	129,336,600	129,336,600	172,448,800
88	MBUWU	441,229,000	132,368,700	132,368,700	176,491,600
89	SALUMPAKU	416,046,000	124,813,800	124,813,800	166,418,400
90	WATATU	406,644,000	121,993,200	121,993,200	162,657,600
91	SURUMANA	394,493,000	118,347,900	118,347,900	157,797,200
92	LALOMBI	412,782,000	123,834,600	123,834,600	165,112,800
93	TANAMEA	408,194,000	122,458,200	122,458,200	163,277,600
94	BAMBARIMI	389,556,000	116,866,800	116,866,800	155,822,400
95	SALUNGKAENU	430,209,000	129,062,700	129,062,700	172,083,600
96	LUMBUMAMARA	429,307,000	128,792,100	128,792,100	171,722,800
97	TOLONGANO	417,920,000	125,376,000	125,376,000	167,168,000
98	TOSALE	437,216,000	131,164,800	131,164,800	174,886,400
99	LUMBU TAROMBO	401,180,000	120,354,000	120,354,000	160,472,000
100	LUMBULAMA	430,420,000	129,126,000	129,126,000	172,168,000
101	ONGULARA	426,460,000	127,938,000	127,938,000	170,584,000
102	MALINO	431,732,000	129,519,600	129,519,600	172,692,800
103	LEMBASADA	397,827,000	119,348,100	119,348,100	159,130,800
104	SAROMBAYA	407,012,000	122,103,600	122,103,600	162,804,800
105	SALUSUMPU	398,194,000	119,458,200	119,458,200	159,277,600
106	TANAMPULU	392,659,000	117,797,700	117,797,700	157,063,600
107	WANI I	391,666,000	117,499,800	117,499,800	156,666,400
108	WANI II	391,047,000	117,314,100	117,314,100	156,418,800
109	NUPABOMBA	402,816,000	120,844,800	120,844,800	161,126,400
110	WOMBO	402,433,000	120,729,900	120,729,900	160,973,200
111	GUNTARANO	403,392,000	121,017,600	121,017,600	161,356,800
112	BALE	411,329,000	123,398,700	123,398,700	164,531,600
113	WOMBO MPANAU	391,040,000	117,312,000	117,312,000	156,416,000
114	WOMBO KALONGGO	394,489,000	118,346,700	118,346,700	157,795,600
115	WANI TIGA	389,611,000	116,883,300	116,883,300	155,844,400
116	WANI LUMBUMPETIGO	395,375,000	118,612,500	118,612,500	158,150,000
117	PALINTUMA	467,185,000	140,155,500	140,155,500	186,874,000
118	GIMPUBIA	411,427,000	123,428,100	123,428,100	164,570,800
119	DANGARA'A	405,033,000	121,509,900	121,509,900	162,013,200
120	BAMBAKANINI	438,018,000	131,405,400	131,405,400	175,207,200
121	BAMBAKAENU	419,944,000	125,983,200	125,983,200	167,977,600
122	TOMODO	427,821,000	128,346,300	128,346,300	171,128,400

123	KANAGALONGGA	419,066,000	125,719,800	125,719,800	167,626,400
124	KARAVIA	439,157,000	131,747,100	131,747,100	175,662,800
125	TAVANGGELI	402,077,000	120,623,100	120,623,100	160,830,800
126	TIBO	428,997,000	128,699,100	128,699,100	171,598,800
127	KALIBURU	415,592,000	124,677,600	124,677,600	166,236,800
128	BATUSUYA	435,791,000	130,737,300	130,737,300	174,316,400
129	SALOYA	451,583,000	135,474,900	135,474,900	180,633,200
130	BATUSUYA GO'O	421,357,000	126,407,100	126,407,100	168,542,800
131	KALIBURU KATA	415,825,000	124,747,500	124,747,500	166,330,000
132	SIKARA TOBATA	440,364,000	132,109,200	132,109,200	176,145,600
133	ALINDAU	446,441,000	133,932,300	133,932,300	178,576,400
134	OTI	432,276,000	129,682,800	129,682,800	172,910,400
135	TAMARENJA	402,301,000	120,690,300	120,690,300	160,920,400
136	SIPESO	407,259,000	122,177,700	122,177,700	162,903,600
137	SINDOSA	398,413,000	119,523,900	119,523,900	159,365,200
138	POWELUA	452,642,000	135,792,600	135,792,600	181,056,800
139	LUMBUDOLO	384,892,000	115,467,600	115,467,600	153,956,800
140	KOLA-KOLA	391,780,000	117,534,000	117,534,000	156,712,000
141	LIMBORO	402,112,000	120,633,600	120,633,600	160,844,800
142	TOWALE	403,068,000	120,920,400	120,920,400	161,227,200
143	SALUBOMBA	400,420,000	120,126,000	120,126,000	160,168,000
144	MEKAR BARU	391,279,000	117,383,700	117,383,700	156,511,600
145	LAMPO	400,596,000	120,178,800	120,178,800	160,238,400
146	OGOAMAS I	413,414,000	124,024,200	124,024,200	165,365,600
147	OGOAMAS II	419,093,000	125,727,900	125,727,900	167,637,200
148	LENJU	414,891,000	124,467,300	124,467,300	165,956,400
149	PESIK	413,849,000	124,154,700	124,154,700	165,539,600
150	BENGKOLI	405,805,000	121,741,500	121,741,500	162,322,000
151	WALANDANO	416,068,000	124,820,400	124,820,400	166,427,200
152	MALEI	408,755,000	122,626,500	122,626,500	163,502,000
153	KAMONJI	403,993,000	121,197,900	121,197,900	161,597,200
154	KETONG	419,716,000	125,914,800	125,914,800	167,886,400
155	RANO	436,485,000	130,945,500	130,945,500	174,594,000
156	POMOLULU	430,691,000	129,207,300	129,207,300	172,276,400
157	PALAU	430,811,000	129,243,300	129,243,300	172,324,400
158	MANIMBAYA	422,245,000	126,673,500	126,673,500	168,898,000
Total		65,339,138,600	19,601,741,580	19,601,741,580	26,135,655,440

BUPATI DONGGALA

ttd

KASMAN LASSA